

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajad, 2004). Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terkekang (Mardiasmo, 2002). Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dengan terbitnya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang jelas menyatakan sistem pemerintah atau pelaksanaan pengelolaan dari sentralistik menjadi desentralistik. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif. Otonomi daerah merupakan pelaksanaan dari ide desentralisasi, konsep desentralisasi terdiri dari tiga yaitu desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative*

decentralization), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dimana ketiganya harus berjalan beriringan dan dengan konsep yang jelas.

Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran. Desentralisasi fiskal bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi (Pakpahan, 2006) pembiayaan mandiri, dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah.

Didalam desentralisasi fiskal banyak sekali fenomena yang terjadi, dimana pemerintah kabupaten seharusnya sudah bukan lagi beban pemerintah pusat, adanya desentralisasi yang seharusnya menjadi wujud dalam pelaksanaan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan malah sebaliknya dimana daerah selalu bergantung dengan pusat. Sebagian kalangan bahkan menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi jangka waktu persiapan yang terlalu pendek untuk ukuran negara yang begitu besar dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan (Brodjonegoro 2003).

Otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya telah digagas dan dilaksanakan sebelum tahun 2001 dalam pemerintahan Indonesia. Dengan adanya UU No. 5 yang diterbitkan tahun 1974 yang setelah itu diganti menjadi UU No. 22 tahun

1999 yang pada akhirnya disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004, Menurut Saragih dalam (Rudy Badrudin, 2012) dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain. Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal dapat memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran dalam pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Menurut UU NO 33 Tahun 2004 tentang Sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lainnya.

Salah satu indikator yang paling digunakan dalam melihat tingkat desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total total penerimaan daerah. Peningkatan (PAD) tentu didorong oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat memicu akselerasi

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebaiknya disertai dengan peningkatan kondisi ekonomi makro dan sosial dari daerah tersebut (BPS Provinsi Sumatera Barat). Oleh karena itu, terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembanguna daerah yaitu indikator-indikator makro ekonomi, seperti (peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan kerja) dan indikator sosial seperti (tenaga kerja, kemiskinan, indesk pembangunan manusia)(Tarigan, 2004).

Pertama, dilihat dari hasil *output* pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami pertumbuhan positif, tetapi belum mampu memecahkan permasalahan dasar di masing-masing daerah, yaitu besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hampir di semua daerah di Sumatera Barat perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah.

Kedua dilihat penyerapan Tenaga Kerja, (Haryo Kuncoro, 2002) menjelaskan, penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian pada tahun 2013 Jumlah Pengangguran di Kabupaten/Kota Sumatera barat adalah sebesar 155.578 jiwa, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 151.657 jiwa, dan pada tahun

2015 mengalami kenaikan kembali yang cukup besar yaitu sebanyak 161.564 jiwa (<http://www.bps.go.id>).

Ketiga dilihat dari aspek kemiskinan, kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya (Suparlan, 2004). jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk miskin tahun ketahun (tabel 4.4), hal ini yang menyebabkan sulitnya perkembangan dan kemaju dalam perekonomian di Sumatera Barat (<http://www.bps.go.id>).

Keempat dilihat dari Indeks Pembangunan manusia (IPM) *Human Development Index (HDI)*. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Biro Pusat Statistik dan UNDP, 1997). Salah satu indikator kemiskinan terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kondisi yang miskin menyebabkan seseorang akan mengeluarkan pendapatanya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak (BPS Sumatera Barat Dalam Angka 2014).

Idealnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi, sehingga hal tersebut memicu makin menariknya isu mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi

penulis untuk menguji apakah melalui desentralisasi fiskal di Sumatera Barat mampu menjawab persoalan ekonomi yang dilihat dari variabel mikro dan sosial yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), sehingga adapun judul yang diambil adalah “**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana dampak desentralisasi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana dampak desentralisasi terhadap penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana dampak desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak desentralisasi terhadap penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat.

4. Untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Dengan Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang Desentralisasi Fiskal terhadap kinerja ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat.

2. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kinerja ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra barat.

3. Dengan Penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada Penelitian kali ini akan melihat seberapa besar peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat dilihat dari tahun 2011 sampai 2015.

1.6 Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika laporan penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian tentang Analisis dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di bagi dalam enam bab.

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB II Landasan teori

Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan ekonomi, Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari data dan sumber data, populasi dan sampel dan definisi operasional variabel.

BAB VI Gambaran Umum Daerah Penelitian

Terdiri dari gambaran umum daerah, kondisi demografi, perkembangan desentralisasi fiskal, perkembangan pertumbuhan ekonomi, perkembangan tenaga kerja, perkembangan kemiskinan, perkembangan indeks pembangunan manusia.

BAB V Temuan Empirin dan Implikasi Kebijakan

Terdiri dari hasil dari semua pengujian data menggunakan metode regresi sederhana dan data panel.

BAB IV Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

